

Pekan Depan, Sumut Berpotensi Diterjang Hujan

Dari Halaman 1

dengan intensitas sedang hingga sangat lebat tercatat di beberapa wilayah seperti, di ARG Patilaban, Mandailing Natal 125 mm," ujarnya, Rabu (16/12/2025).

Selain gangguan sirkulasi sirkonik, lanjut Hendro, aktivitas Gelombang Kelvin di Sumatera Utara juga turut menjadi salah satu pemicu hujan sedang hingga sangat lebat.

"Kondisi kelembaban udara yang masih tinggi dan atmosfer yang relatif labil turut menambah potensi pertumbuhan awan hujan di sebagian wilayah Sumut sehingga tetap perlu

diwaspadai," jelasnya.

Cuaca di Sumatera Utara, tambah Hendro, umumnya didominasi oleh kondisi hujan sedang hingga sangat lebat. Adapun wilayah yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat antara lain di Kabupaten Langkat, Medan, Binjai, Deliserdang,

"Kemudian Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Asahan, Batubara, Simalungun, Samosir, Serdangbedagai, Kota Tebing Tinggi, Humbang Hasundutan, Nias, Nias Selatan, Nias Utara,

Nias Barat, Kota Gunungsitoli, Labuhanbatu, dan Toba," ujarnya.

Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan dapat mengambil langkah antisipatif agar aktivitas harian tetap dapat berlangsung aman dan lancar.

"Selalu merujuk kepada informasi dari BMKG agar tidak mudah mempercayai informasi cuaca dari sumber yang tidak resmi. Para kepala daerah juga diimbau untuk dapat berkoordinasi dengan BPBD, TNI, POLRI setiap kali terjadi pengembangan informasi yang disampaikan oleh BMKG melalui media sosial @infobmkgsumut," tegasnya.(cnni/js)

1.059 Meninggal, 588.226 Mengungsi

Dari Halaman 1

1.059 jiwa," Ujar Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhamadi dalam konferensi pers, Rabu (17/12).

Untuk jumlah korban hilang, dari total tiga provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar), hari ini berkurang 8 orang. Dari sebelumnya 200 orang, hari ini menjadi 192 orang.

Kemudian untuk jumlah pengungsi, hari ini berkurang 17.814 orang, sehingga total berjumlah 588.226 orang. Jumlah tersebut berkurang dari kemarin total 606.040 orang.

26 Wilayah Masih Tanggap Darurat

Sementara itu, Abdul juga mengatakan saat ini masih ada 26 kabupaten/kota yang masih pada status tanggap darurat. Termasuk Kota Padang dan Pasaman yang memperpanjang status tanggap daruratnya.

"Secara tiga provinsi, ini masih ada 26 kabupaten/kota yang masih berada pada status tanggap darurat. Ada dua kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang memperpanjang status tanggap darurat, yaitu Kota Padang dan Pasaman Barat. Kota Padang ini mengalami banjir susulan beberapa hari yang lalu sehingga status tanggap darurat masih diperpanjang" ungkapnya.

Abdul mengatakan data tersebut akan terus diperbarui demi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus.

"Ini masih terus kita mutakhirkan. Dan saat ini kita lakukan juga nanti akan saya sampaikan secara lebih mendetail beberapa hasil pengumpulan data pilah yang sudah dilakukan enumerator di beberapa kabupaten/kota, khususnya di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara," ujarnya.

"Dan hari ini kita akan coba melihat beberapa hasil yang bisa disampaikan dari pengumpulan data pilah tersebut dan dalam kaitannya nanti pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus yang muncul dari data yang sudah kita kumpulkan," sambungnya.(cnni/js)

5 Kecamatan di Sumbar Krisis Air Bersih

Dari Halaman 1

tidak karena banjir dan longsor," kata Kepala Pelaksana BPBD Agam Rahmat Lasmono mengutip Antara, Rabu (17/12).

Ia mengatakan ke lima kecamatan itu yakni Kecamatan Tanjung Raya, Malalak, Ampek Koto, Palembayan dan Matur.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, PMI, relawan dan lainnya mendistribusikan

air ke warga menggunakan mobil tangki.

"Pendistribusian air bersih menggunakan mobil tangki dan masyarakat menyediakan bak penampung air," katanya.

Dengan kondisi itu, dibutuhkan pipa air untuk memperbaiki jaringan yang rusak, agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Banjir bandang dan tanah longsor mengakibatkan sejumlah titik tanah longsor yang mengakibatkan sumber air bersih

rusak. Bencana alam itu, mengakibatkan 192 orang meninggal dunia, korban belum ditemukan 72 orang dan korban dirawat delapan orang.

Rumah rusak ringan 472 unit, rusak sedang 290 unit, rusak berat 838 unit, fasilitas pendidikan yang rusak 114 unit, tempat ibadah yang rusak 11 unit.

Untuk jembatan yang rusak 49 titik, jalan yang rusak 69 titik, lahan pertanian yang rusak 1.948,23 hektare dan lainnya.(cnni/js)

2 Pejabat PT Inalum Ditahan

Dari Halaman 1

Perintah Penyidikan Kajati Sumatera Utara Nomor Nomor : Print-28/L.2/Fd.2/10/2025 tanggal 27 Oktober 2025 menetapkan status tersangka kepada dua orang yakni, DS se-laku SEVP (Senior Executive Vice President) Pengembangan Usaha PT Inalum tahun 2019, dan JS selaku Kepala Departemen Sales and Marketing PT Inalum 2019.

Dari hasil penyidikan, tim telah menemukan minimal dua alat bukti yang cukup tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan kedua tersangka, dimana mereka diduga telah mengubah skema pembayaran yang sebelumnya harus secara cash dan SKBN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) kemudian diubah menjadi Dokumen Agen Acceptance (D/A) dengan Tenor selama 180 hari.

"Sehingga PT PASU tidak melakukan

pembayaran atas aluminium alloy yang sudah dikirim oleh PT Inalum yang mengakibatkan kerugian negara pada PT Inalum yang diperkirakan mencapai USD 8.000.000 yang jika dikonversi dalam rupiah saat ini diperkirakan mencapai Rp133.496.000.000 namun untuk kepastian nominal kerugian negaranya saat ini masih dalam proses perhitungan," ungkap Kajati Sumut Dr Harli Siregar melalui Kasi Penkum Indra Hasibuan Sh MH dalam keterangan, Rabu (17/12/2025).

Selanjutnya, tambah Indra, kepada kedua tersangka diberi sanksi melanggar pasal Pasal 2 ayat (1) Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tak hanya jaminan hidup, Gus Ipul mengatakan ketika mereka telah menempati hunian sementara atau hunian tetap, pemerintah juga akan memberikan bantuan sebesar Rp3 juta untuk warga mengisi perabotan rumah.

Lalu ia menyebut masing-masing kartu

"Setelah pemeriksaan kesehatan kepada tersangka serta untuk menghindari tersangka mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti ataupun melarikan diri penyidik pidana khusus melakukan penahanan maka terhadap tersangka dengan surat perintah penahanan yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor PRINT-29/L.2/Fd.2/12/2025 tanggal 17 Desember 2025 untuk tersangka JS dan Nomor PRINT-30/L.2/Fd.2/12/2025 tanggal 17 Desember 2025 untuk tersangka DS dengan perintah melakukan penahanan untuk 20 hari pertama di Rutan kelas IA Tanjung Gusta Medan," tegas Indra.

"Tim penyidik terus bekerja melakukan pendalaman dan jika ditemukan adanya keterlibatan orang atau pihak lain baik perorangan maupun koorporasi tentu akan dilakukan tindakan hukum sebagaimana mestinya," pungkasnya. (A-08)

Keluarga Korban Wafat Bakal Dapat Santunan

Dari Halaman 1

yang akan diserahkan ke ahli waris," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (17/12).

Sementara bagi yang mengalami luka berat juga akan mendapatkan santunan sebesar Rp5 juta. Gus Ipul menyebut kini pemerintah juga tengah menyiapkan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak.

Setelahnya, dalam tiga bulan ke depannya setiap orang dalam keluarga terdampak akan

mendapatkan dukungan Rp10 ribu per hari.

Namun, Gus Ipul menyebut angka itu masih menggunakan indeks perhitungan 2020, sehingga ia masih menunggu arahan lebih lanjut dari Menko PMK Pratikno perihal itu.

Tak hanya jaminan hidup, Gus Ipul mengatakan ketika mereka telah menempati hunian sementara atau hunian tetap, pemerintah juga akan memberikan bantuan sebesar Rp3 juta untuk warga mengisi perabotan rumah.

Lalu ia menyebut masing-masing kartu

keluarga warga terdampak juga akan mendapatkan dukungan untuk pemuliharaan ekonomi tahap pertama yang rencana besarannya sebesar Rp5 juta.

Banjir bandang dan longsor menerjang sejumlah daerah di Pulau Sumatra. BNPB melaporkan jumlah korban meninggal dunia mencapai 1.059 jiwa per Rabu (17/12).

Untuk jumlah korban hilang, dari total tiga provinsi, masih berjumlah 192 orang. Kemudian untuk jumlah pengungsi masih ada 606.040 orang.(cnni/js)

Buruh Ancam Demo Berjilid-jilid Jelang Natru

Dari Halaman 1

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan aksi tersebut menunggu pengumuman UMP oleh gubernur se-Indonesia. Tengat waktu yang ditetapkan pemerintah adalah 24 Desember 2025.

Sedangkan rumus UMP tahun depan adalah Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alpha). Alpha yang ditetapkan adalah 0,5-0,9. KSPI setuju dengan formula UMP 2026, asalkan indeks tertentu atau alpha yang dipakai adalah 0,9.

"Bisa dipastikan aksi nasional akan dilaku-

kan, tanggal berapa? Setelah 24 Desember (2025). Sampai dengan Januari (2026) pun kita bisa aksi berjilid-jilid, bergelombang. Kalau gubernur mengkhianati, mengubah keputusan Presiden (Prabowo Subianto)," tegaskan dalam Konferensi Pers via Zoom, Rabu (17/12).

"Kami ingin berjuang di 0,9, kan boleh. Kalau batupati/wali kota setuju, kan boleh. Dengan demikian, aksi nasional kemungkinan besar baru bisa dilakukan setelah 24 Desember (2025)," sambung Iqbal.

Iqbal menegaskan dirinya tidak menghalangi aksi demonstrasi di daerah. Bahkan, ia menga-

takan tempat yang harus diprotes oleh buruh adalah kantor-kantor gubernur.

Terlebih, Iqbal mendengar aduan buruh bahwa DKI Jakarta dan Jawa Barat bersiasi menggunakan alfa yang rendah. Pria yang juga menjabat sebagai Presiden Partai Buruh itu menutut alfa yang dipakai dalam penetapan UMP 2026 adalah 0,9.

"Kok belum berunding sudah ada instruksi? Seperti Gubernur Jawa Barat (Dedi Mulyadi) 0,5, Gubernur DKI Jakarta (Pramono Anung) 0,7. Ini apa-apaan? Belum berunding sudah instruksi, ini kan gaya-gaya pemerintahan lama," ungkap Iqbal. (cnni/js)

Ketika Ratusan Ribu Hektare Sawit PTPN III

Dari Halaman 1

penyanga hidrologis Sumatera.

Di sinilah masalah bermula. Bukit Barisan bukan ruang kosong yang bebas ditanami apa saja. Ia adalah tulang punggung ekologis. Air hujan ditahan di sana, dilepas perlahan ke sungai-sungai di hilir. Ketika kawasan ini dibuka untuk perkebunan monokultur berskala besar, fungsi itu terganggu. Tajuk hutan yang berlapis diganti hamparan seragam. Akar dalam yang mengikat tanah diganti akar dangkal. Jalan-jalan kebun membelah lereng. Parit-parit drainase mempercepat air turun ke bawah.

Sawit, secara ilmiah dan historis, dirancang untuk tumbuh optimal di dataran rendah. Ketika ia dipaksakan naik ke perbukitan, risiko hidrologi meningkat tajam. Air tidak lagi diserap, tetapi dialirkan. Sungai kecil di hilir berubah menjadi saluran percepatan. Dan ketika hujan ekstrem datang seperti yang terjadi belakangan ini, maka hilir menerima akumulasi air dan lumpur sekaligus.

PTPN III tentu memiliki jawaban administratif. Lahan disebut berstatus APL. Izin dikan-tongi. AMDAL disusun. Drainase dirancang. Tetapi tidak tahukah kalian bahwa banjir tidak membaca peta tata ruang? Air tidak tunduk pada dokumen perizinan. Ia hanya patuh pada gravitasi dan kerusakan yang diciptakan manusia.

Yang lebih problematik, PTPN III bukan sekadar perusahaan. Ia adalah representasi negara di lapangan. Maka ketika kebun negara berada di kawasan hulu yang rusak, pertanyaannya bukan lagi sekedar soal bisnis, tetapi soal konflik kepentingan dan kegagalan tata kelola. Negara menjadi regulator sekaligus pelaku. Pengawas sekaligus pemain.

Penghentian sementara operasional kebun tidak boleh dimaknai sebagai langkah kosmetik. Dengan luasan sawit yang demikian besar, evaluasi tidak cukup dilakukan per unit kebun. Yang dibutuhkan adalah audit bentang alam menyangkut bagaimana keseluruhan jaringan kebun, jalan, dan drainase PTPN III memen-

garahi satu DAS secara utuh. Tanpa itu, negara hanya memotong ranting, bukan mencabut akar masalah.

Islam mengajarkan bahwa amanah kekuasaan mengandung tanggung jawab berlipat. Semakin besar kuasa, semakin berat hisabnya. Negara tidak bisa bersembunyi di balik status BUMN ketika air bah menenggelamkan rakyatnya sendiri. Keadilan tidak boleh berhenti pada perusahaan swasta. Ia harus berani menyentuh kebun negara.

Jika PTPN III yakin kontribusinya nol terhadap bencana ini, maka buka seluruh data luasan per kebun, peta ketinggian, desain drainase, hingga histori pembukaan lahan. Biarkan publik menilai. Tetapi jika dari ratusan ribu hektare itu terbukti ada bagian yang memperparah banjir, maka pemulihara ekologis dan pertanggungjawaban hukum bukan pilhan melainkan kewajiban.

Karena dalam setiap tetes air yang melaui kebun warga, tersimpan satu kebenaran sederhana bahwa skala kerusakan selalu sebanding dengan skala pembiaran. (*)



Jalur Utama Listrik

Dari Halaman 1

cepat berkat inovasi memanfaatkan alat berat crane menjadi tower atau tiang listrik darurat.

Kondisi tanah yang labil membuat PLN mengambil langkah taktis dengan memanfaatkan crane. Hal ini dilakukan untuk memastikan aliran listrik segera tersalurkan ke rumah-rumah warga terdampak bencana.

"Crane yang digunakan sebagai tower darurat ini menjadi penopang jalur transmisi yang menghubungkan sistem kelistrikan Sumatera ke Aceh," demikian dikutip dari akun Instagram resmi PLN, Rabu (17/12).

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kilovolt (kV) yang menghubungkan Langsa (Aceh) dan Pangkalan Brandan (Sumut) sempat lumpuh akibat bencana.

Listrik yang mengalir dari Sumatera Utara ke Aceh lewat jalur utama ini sempat terputus akibat lima towernya robuh dan tujuh lainnya rusak berat diterjang banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tamiang.

Rabu (17/12), PLN berhasil menyambungkannya kembali